

# Optimalisasi Layanan Posyandu melalui Implementasi 6 Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Jepara

<sup>1</sup>Via Melinda Putri\*, <sup>2</sup>Shafna Awalia Rahma, <sup>3</sup>Rina Rachmawati, <sup>4</sup>Edi Utoyo


<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>4</sup>Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Jepara, Jepara, Indonesia

Email Corresponding: [viamelinda17@students.unnes.ac.id](mailto:viamelinda17@students.unnes.ac.id)

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Kata Kunci:</b> Posyandu 6 SPM Penelitian Tindakan Partisipatif Integrasi Layanan Dasar Kapasitas Kader Optimalisasi Layanan	Implementasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman kader, belum optimalnya integrasi layanan lintas sektor, serta keterbatasan sarana pendukung. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan Posyandu melalui penguatan kapasitas kader dan penerapan integrasi layanan berbasis 6 SPM di Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan model Participatory Action Research yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi, simulasi layanan terpadu, dan pendampingan kader pada desa lokus pilot project. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pengetahuan kader, ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata nilai dari 71,00 menjadi 85,50 atau meningkat sebesar 20,42%. Selain itu, terjadi penurunan standar deviasi yang menunjukkan peningkatan pemerataan pemahaman kader. Dampak kegiatan juga terlihat pada meningkatnya keterampilan kader dalam mengimplementasikan layanan terpadu serta mulai terbangunnya koordinasi lintas sektor dalam kegiatan Posyandu. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam mendukung optimalisasi layanan Posyandu berbasis integrasi SPM dan berpotensi untuk direplikasi secara berkelanjutan di wilayah lain.
<b>Keywords:</b> Integrated Service Posts Minimum Service Standards Participatory Action Research Cadre Capacity Building Service Optimization	<b>ABSTRACT</b> The implementation of Posyandu based on the six Minimum Service Standards (SPM) at the village level still faces obstacles such as low understanding of cadres, suboptimal integration of cross-sector services, and limited supporting facilities. This community service activity aims to optimize Posyandu services by strengthening cadre capacity and implementing integrated services based on the 6 SPM in Jepara Regency. The method used is a participatory approach with the Participatory Action Research model which includes the preparation, implementation, mentoring, and monitoring and evaluation stages. This activity was carried out through socialization, integrated service simulations, and cadre mentoring in the pilot project village. The results showed a significant increase in cadre knowledge, indicated by an increase in the average score from 71.00 to 85.50 or an increase of 20.42%. In addition, there was a decrease in the standard deviation indicating an increase in the equality of cadre understanding. The impact of the activity was also seen in the increased skills of cadres in implementing integrated services and the beginning of cross-sector coordination in Posyandu activities. These findings indicate that the participatory approach is effective in supporting the optimization of Posyandu services based on SPM integration and has the potential to be replicated sustainably in other regions.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan berbasis masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa (Erni Ameliya et al., 2025). Melalui kesehatan Posyandu, masyarakat khususnya ibu hamil, bayi, dan balita dapat memperoleh layanan kesehatan secara lebih mudah dan terjangkau. Selain memberikan pelayanan kesehatan

dasar, Posyandu juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap upaya pemeliharaan kesehatan keluarga (Nurbaya et al., 2022).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah, pemerintah mendorong transformasi fungsi Posyandu melalui penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurut (pratama et al., 2025) pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik dalam aspek kesehatan maupun administrasi pemerintahan. Konsep Posyandu 6 SPM menekankan integrasi berbagai layanan dasar yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum linmas, serta bidang sosial. Integrasi layanan tersebut diharapkan mampu memperluas peran Posyandu tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar secara lebih terpadu (Kumalasari et al., 2025).

Implementasi konsep Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil observasi awal serta koordinasi dengan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Jepara, sebagian kader Posyandu belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai integrasi layanan enam bidang SPM, Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan Posyandu di beberapa desa masih didominasi oleh pelayanan kesehatan dasar seperti penimbangan balita, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara perangkat desa, tenaga kesehatan, serta instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan layanan terpadu juga belum berjalan secara optimal.

Sebagai bagian dari upaya penguatan implementasi Posyandu 6 SPM, Pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan sejumlah desa sebagai lokus pilot project pelaksanaan program tersebut. Program ini dilaksanakan di 16 desa yaitu Desa Pengkol, Tedunan, Ngabul, Ragulampitan, Tubanan, Tengguli, Sumberrejo, Klepu, Suwawal, Lebak, Gedangan, Pendo Sawalan, Bendanpete, Pecangaan Wetan, Buaran, dan Kemujan. Penetapan desa-desa tersebut bertujuan untuk menjadi percontohan dalam penerapan integrasi layanan Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal di tingkat desa.

Meskipun demikian, hasil identifikasi awal (Nurhayati et al., 2026) menunjukkan implementasi program pada beberapa desa tersebut masih memerlukan penguatan kapasitas kader, peningkatan pemahaman mengenai integrasi layanan, serta dukungan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dalam kebijakan Posyandu 6 SPM dengan kondisi aktual di lapangan. Secara konseptual, Posyandu diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang melibatkan berbagai sektor dalam menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat (Haryono et al., 2024). Akan tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan program tersebut masih membutuhkan penguatan sumber daya manusia serta pendampingan dalam implementasi integrasi layanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan layanan Posyandu melalui implementasi enam Standar Pelayanan Minimal pada desa-desa yang ditetapkan sebagai lokus pilot project di Kabupaten Jepara. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi kebijakan Posyandu 6 SPM, simulasi pelaksanaan layanan terpadu, serta pendampingan kepada kader Posyandu dan perangkat desa guna meningkatkan pemahaman serta kesiapan dalam mengimplementasikan integrasi layanan tersebut.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada pendekatan optimalisasi layanan Posyandu melalui penguatan kapasitas kader dan simulasi integrasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal secara langsung pada desa pilot project di Kabupaten Jepara. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman kader serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan Posyandu. Dengan demikian, Posyandu dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

## II. MASALAH

Kegiatan pendampingan implementasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan pada Posyandu yang ditetapkan sebagai lokus pilot project di beberapa desa di Kabupaten Jepara, yaitu Desa Pengkol, Tedunan, Ngabul, Ragulampitan, Tubanan, Tengguli, Sumberrejo, Klepu, Suwawal, Lebak, Gedangan, Pendo Sawalan, Bendanpete, Pecangaan Wetan, Buaran, dan Kemujan. Pemilihan desa tersebut didasarkan pada potensi pengembangan Posyandu sebagai pusat layanan masyarakat terpadu di tingkat desa.

Hasil observasi awal serta koordinasi dengan perangkat desa, kader Posyandu, dan tenaga kesehatan setempat, diketahui bahwa kegiatan Posyandu di wilayah tersebut masih berfokus pada pelayanan kesehatan dasar seperti penimbangan balita, imunisasi, dan pemeriksaan ibu hamil. Sementara itu, implementasi konsep Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum linmas, serta bidang sosial belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu.

Selain itu, pelaksanaan Posyandu masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan pemahaman kader mengenai konsep Posyandu 6 SPM, belum optimalnya koordinasi lintas sektor di tingkat desa, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan Posyandu belum sepenuhnya mencerminkan konsep layanan terpadu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (Zubaedah & Putri, 2024).

Berdasarkan analisis situasi tersebut, permasalahan prioritas yang dihadapi mitra meliputi:

1. Keterbatasan pemahaman kader Posyandu mengenai implementasi Posyandu 6 SPM.
2. Belum optimalnya integrasi enam bidang pelayanan dalam kegiatan Posyandu.
3. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan Posyandu terpadu
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Posyandu.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendampingan, sosialisasi, dan simulasi implementasi Posyandu 6 SPM guna meningkatkan kapasitas kader serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat di tingkat desa (Yulyuswarni et al., 2023)



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Gambar tersebut menunjukkan kondisi lokasi pelaksanaan kegiatan Posyandu yang menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan pendampingan. Dokumentasi ini menggambarkan situasi lapangan serta menjadi bukti observasi awal sebelum pelaksanaan program implementasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal.

### III. METODE

Metode Pelaksanaan Pendampingan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam proses implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada lokus pilot project di kabupaten Jepara (Khaira et al., 2024). Metode kualitatif dipilih untuk menggali pengalaman, pemahaman dan praktik para kader secara lebih mendalam (Sarina Defa, 2025).

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pendekatan partisipatif dengan model Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, hingga evaluasi dan refleksi yang dilakukan secara kolektif. Lokasi tempat kegiatan dilaksanakan pada Posyandu yang menjadi lokus pilot project implementasi enam Standar Pelayanan Minimal pada beberapa desa terpilih di Kabupaten Jepara, yang selanjutnya diharapkan dapat direplikasi pada desa-desa lainnya. Desa yang terpilih diantaranya, desa Pengkol, Tedunan, Ngabul, Regulampitan, Tubanan, Tengguli, Sumberrejo, Klepu, Suwawal, Lebak, Gedangan, Pendo Sawalan, Bendanpete, Pecangaan Wetan, Buaran, dan Kemujan.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan kolaborasi multipihak yang terdiri dari tim pengabdian, perangkat desa, kader dan ketua Posyandu, serta dukungan teknis dari dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, dan Satpol PP Kabupaten Jepara. Media yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa power point, modul materi, leaflet, dan poster mengenai Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada lokus pilot project.

Implementasi pendekatan PAR dalam kegiatan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas, pemerintahan desa, serta kader Posyandu untuk menentukan lokasi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu tim pengabdian mengidentifikasi kondisi awal pelaksanaan Posyandu serta kebutuhan kader dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM. Pada tahap ini, juga dilakukan penyusunan materi pelatihan dan penyiapan media edukasi. Sebelum pelatihan dimulai, kader menjalani pre-test untuk mengukur pengetahuan awal kader Posyandu mengenai konsep dan pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Media dan alat yang digunakan dalam Pelaksanaan Posyandu 6 SPM meliputi laptop, LCD proyektor, materi presentasi dalam bentuk power point, modul pelatihan Posyandu 6 SPM, leaflet edukasi, poster informasi kesehatan, serta lembar pre-test dan post-test.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

(Netra Wirakhmi & Arni Nur Rahmawati, 2024) mengungkapkan bahwa tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada kader Posyandu dan masyarakat. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, dan simulasi layanan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). (Nurbaya et al., 2022) materi yang disampaikan mencakup konsep Posyandu 6 SPM, peran kader dalam pelayanan dasar masyarakat, serta mekanisme pelaksanaan layanan Posyandu secara terpadu. Setelah pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan terhadap pelaksanaan layanan Posyandu di masing-masing desa. Pendampingan ini dilaksanakan secara berkala oleh tim Posyandu 6 SPM bersama dinas terkait, untuk memberikan arahan kepada kader serta memastikan implementasi layanan Posyandu berlangsung sesuai dengan standar yang ditentukan. Pada tahapan melalui pendekatan partisipatif dengan model Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini melibatkan proses perencanaan, tindakan dan refleksi yang dilakukan secara partisipatif bersama kader dan tim pembina Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

#### 3. Tahap Evaluasi

Menurut (Sintiawati et al., 2021) tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini dilaksanakan secara berkelanjutan selama masa pendampingan. Evaluasi dilakukan melalui post-test kepada para kader untuk mengetahui peningkatan pengetahuan kader setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan melalui observasi pelaksanaan kegiatan Posyandu, diskusi bersama kader, serta wawancara semi-terstruktur kepada kader Posyandu, tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini berupa kuesioner pengetahuan tentang Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diberikan sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) kegiatan penyuluhan yang terdiri dari 10 butir pertanyaan. Kelompok sasaran dalam kegiatan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini adalah kader-kader dari 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) diantaranya, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, dan bidang trantibumlinmas.

Indikator keberhasilan kegiatan Posyandu 6 SPM ini mencakup peningkatan pengetahuan kader tentang posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kemampuan kader dalam memberikan layanan Posyandu, serta terlaksananya pelaksanaan layanan Posyandu yang lebih terintegrasi di desa lokus pilot project sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan (Hermala Dewi et al., 2022).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian kader belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dasar kader masih terbatas, sehingga sebagian besar kader mengalami kesulitan dalam memahami alur pelaksanaan layanan Posyandu berbasis 6 SPM. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan secara

interaktif dan terbuka, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, dimana kader mulai mampu memahami konsep Posyandu 6 SPM dengan lebih baik.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara intensif dengan menggunakan media visual, seperti leaflet dan Power Point, membantu kader dalam memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiyanto et al., 2025) yang menyatakan bahwa metode fasilitasi bukan hanya efektif untuk transfer pengetahuan, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan kepemilikan terhadap perubahan.

Pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan di beberapa desa diantaranya, desa Pengkol, Tedunan, Ngabul, Regulampitan, Tubanan, Tengguli, Sumberrejo, Klepu, Suwawal, Lebak, Gedangan, Pendosawalan, Bendanpete, Pecangaan Wetan, Buaran, dan Kemujan yang terbagi menjadi empat tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Pendekatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kader sekaligus memastikan implementasi Posyandu 6 SPM berjalan secara berkelanjutan.



Gambar 2. Sosialisasi dan Penyuluhan



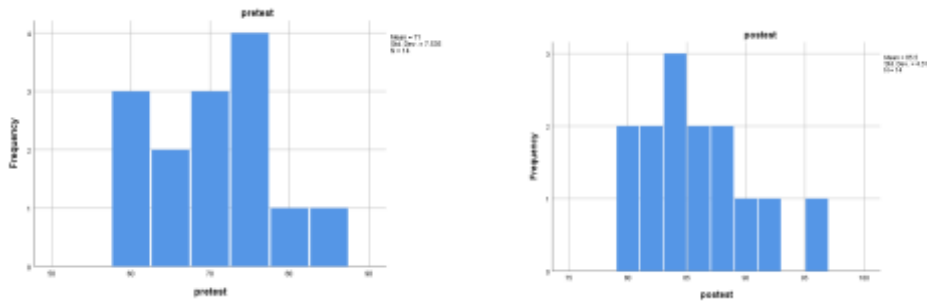
Gambar 3. Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi

Upaya optimalisasi layanan Posyandu melalui implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jepara menunjukkan adanya perubahan nyata, terutama pada peningkatan kapasitas kader dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk menilai efektivitas kegiatan dalam mendukung optimalisasi layanan Posyandu, dilakukan pengukuran melalui pre-test dan post-test terhadap kader. Hasil analisis deskriptif ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Pre-test dan Post-test

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pretest	14	60	84	71.00	7.535
posttest	14	80	95	85.50	4.519
Valid N (listwise)	14				

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata nilai kader mengalami peningkatan dari 71,00 pada pre-test menjadi 85,50 pada post-test. Kenaikan sebesar 14,50 poin atau sekitar 20,42% ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan setelah kegiatan dilakukan. Selain itu, peningkatan nilai minimum dari 60 menjadi 80 mengindikasikan bahwa seluruh kader mengalami perbaikan kemampuan dasar. Penurunan nilai standar deviasi dari 7,535 menjadi 4,519 juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman kader menjadi lebih merata.



Gambar 4. Grafik Distribusi Nilai Pre-test dan Post-test Kader

Perubahan distribusi nilai dari pre-test dan post-test menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan rata-rata pengetahuan kader, tetapi juga mengurangi kesenjangan pemahaman antar kader. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan berkontribusi secara signifikan dalam mendukung optimalisasi layanan Posyandu melalui peningkatan kapasitas kader yang lebih merata.

Peningkatan pengetahuan tersebut berdampak pada aspek keterampilan kader dalam mengimplementasikan layanan Posyandu (Surtimanah et al., 2024). Kader mampu memahami alur pelayanan berbasis 6 SPM serta mengintegrasikan jenis layanan dalam satu kegiatan posyandu. Kondisi ini mencerminkan adanya transformasi dari layanan yang bersifat sektoral menjadi layanan yang lebih terpadu dan komprehensif, sehingga mendukung optimalisasi fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar di tingkat desa.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Posyandu sebelumnya yang masih terbatas pada layanan kesehatan dasar, implementasi Posyandu 6 SPM menunjukkan peningkatan yang lebih komprehensif melalui integrasi layanan lintas sektor. Integrasi ini didukung oleh berbagai inovasi daerah seperti program SELARAS JEPARA pada bidang pendidikan, PESONA DATUK dan SEHATI pada bidang kesehatan, serta JEPARA CARE pada bidang sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis SPM lebih efektif dalam mengoptimalkan layanan Posyandu di tingkat desa.

Instrumen hasil wawancara dengan kader posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat menunjukkan bahwa penerapan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki keunggulan dalam memperluas integrasi pelayanan dasar di tingkat desa. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan secara lebih mudah dalam satu kegiatan Posyandu. Selain itu, program ini juga mendorong terjalinnya koordinasi lintas sektor serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan.

Meskipun demikian, dalam proses implementasinya masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi layanan Posyandu tidak hanya bergantung pada peningkatan kapasitas kader, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan, sinergi lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, implementasi Posyandu 6 SPM di Kabupaten Jepara terbukti mampu mengoptimalkan layanan Posyandu melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader, serta penguatan integrasi layanan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa pendampingan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan dukungan sarana dan prasarana agar optimalisasi layanan Posyandu dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

## V. KESIMPULAN

Implementasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jepara menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas layanan Posyandu di tingkat desa. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya indikator peningkatan pengetahuan kader, yang terlihat dari kenaikan nilai rata-rata pre-test ke post-test, serta meningkatnya keterampilan kader dalam memahami dan menerapkan alur layanan Posyandu 6 SPM secara terpadu. Selain itu, mulai terwujudnya integrasi layanan lintas sektor dalam kegiatan Posyandu menjadi indikator bahwa fungsi Posyandu telah berkembang menuju layanan yang lebih komprehensif.

Program ini juga berhasil mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan utama berupa keterbatasan

pemahaman kader, belum optimalnya integrasi layanan, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dapat mulai teratasi melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif.

Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan program, diperlukan penguatan kapasitas kader secara berkelanjutan, peningkatan dukungan sarana dan prasarana, serta komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor. Selain itu, model pendampingan Posyandu 6 SPM ini dapat direkomendasikan untuk direplikasi di desa lain dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal, sehingga upaya optimalisasi layanan Posyandu dapat diperluas dan memberikan dampak yang lebih merata.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas dukungan serta fasilitasi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Pembina Posyandu Kabupaten Jepara, pemerintah desa pada wilayah lokus pilot project, kader Posyandu, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erni Ameliya, Dinda Salmi Nabiyah, Ashri Rahmaya Nur, Ega Januaryl Pratama Putri, Octa Ida Manullang, & Ratih Wirapuspita Wisnuwardani. (2025). Pengabdian Masyarakat dalam Mendukung Program Pemerintah melalui Posyandu ILP di Puskesmas Bontang Selatan I. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 2949–2955. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.850>
- Haryono, M. B., Fauzi, S., Sumarna, A., Emuh, D., & Listian, E. Y. (2024). *Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Posyandu di Kampung Cirawa, Desa Nyalindung*. 3, 451–458.
- Hermala Dewi, N., Yupartini, L., & Aminah. (2022). Pilot Project: Model Intervensi Keluarga Sehat Dengan Pendekatan Standar Pelayanan Minimal Untuk Mencapai Program Indonesia Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Kramatwatu. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 50–57. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.56>
- Khaira, N., br Ginting, N., Nur Ardiani, A., Annisyah, W., Salsabilla Lubis, N., & Suraya, R. (2024). Analisis Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat pada Posyandu Kamboja Desa Bandar. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1206–1214. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.6922>
- Kumalasari, D., Noverlian, D., Ningsih, I. A., Pembina, T., Provinsi, P., Riau, K., Komunikasi, D., Provinsi, I., Dinas, F., & Provinsi, K. (2025). Strategi Dan Penerapan Enam Standar Pelayanan Minimal Posyandu di Provinsi Kepulauan Riau. In *Jurnal Archipelago* (Vol. 4, Number 1).
- Netra Wirakhmi, I., & Arni Nur Rahmawati. (2024). Penyuluhan Tentang Pelaksanaan Posyandu Sistem 5 Meja Pada Kader Posyandu Bergas Waras kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(4), 79–87. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i4.3289>
- Nurbaya, N., Haji Saeni, R., & Irwan, Z. (2022). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader Posyandu Melalui Kegiatan Edukasi dan Simulasi. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 678. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6579>
- Nurhayati, I., Nasution, Z., Nasution, E., Halida, A. H., Kemenkes Yogyakarta, P., & Medan, P. K. (2026). Peningkatan Kemampuan Kader untuk Memaksimalkan Kepuasan Layanan Masyarakat di Posyandu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu Kesehatan & Kedokteran Optimal* / 59, 3(1), 59–66.
- Pratama, A., Adriak Putra, M., & Widayawara Indonesia, S. (2025). *Optimalisasi Pelayanan Publik dan Kesehatan Masyarakat (Peran Mahasiswa PKL di Kantor Wali Nagari dan Posyandu di Nagari Pakan Rabaa Utara)*. <https://journal.jurnal.widyaswara.ac.id/index.php/jpmwi>
- Sarina Defa.,(2025). Model Integrasi Layanan Kesehatan Jiwa dalam Posyandu Plus Berbasis SPM. *Jurnal Sukowaskita*.
- Septiyanto, D., Rizky Nasution, S., Dharma Karini Ag, M., Pemerintahan Desa Kemendagri di Yogyakarta, B., & Kesehatan Universitas Islam Mulia Yogyakarta, A. (2025). Fasilitasi Implementasi New Posyandu 6 SPM: Administrasi Posyandu dalam Pelayanan dan Tata Kelola Kelembagaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mulia Madani Yogyakarta*, 3(2).
- Sintiawati, N., Suherman, M., & Saridah, I. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan Posyandu* (Vol. 1, Number 1). <https://journal.imadiklus.or.id/index.php/lej>
- Surtimanah, T., Sjamsuddin, I. N., Ruhayat, E., & Pamungkas, G. (2024). Peningkatan Pengetahuan Kader Tentang Posyandu di Era Transformasi Layanan Kesehatan Primer dan Kewirausahaan. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(2), 295. <https://doi.org/10.30595/jppm.v8i2.21284>

- Yulyuswarni, Y., Mugiati, M., & Isnenia, I. (2023). Penguatan Peran Kader sebagai Agen Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Rintisan Posyandu Prima dalam Mendukung Transformasi Kesehatan Pelayanan Primer di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(6), 1761–1770. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1003>
- Zubaedah, I., & Putri, S. N. (2024). Efektivitas Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan di Daerah Rawamangun. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif Volume 24 Nomor 1*.